PERPUSTAKAAN EMIL SALIM KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Koran : Koran Jakarta

Edisi: 29 April 2010

Halaman: 13

Subyek: Iklim

Berita Lingkungan Hidup

Australia Tunda Perdagangan Karbon

Perubahan Iklim

SYDNEY – Australia kemarin terpaksa menunda rencana skema perdagangan karbon guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dengan penundaan itu, pemerintah tidak akan memulai perdagangan karbon sebelum 2013, saat Protokol Kyoto sudah berakhir.

Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengatakan rencana Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS) ditunda lagi setelah gagal melewati persetujuan parlemen.

Pemerintah beberapa kali mengajukan rencana ke parlemen, tetapi kandas di Senat. Pemerintah Rudd tidak memiliki kursi mayoritas di Senat.

"Oposisi memutuskan untuk menarik dukungan terhadap komitmen historis untuk meloloskan CPRS. Ini menyebabkan realisasi aksi global mengurangi perubahan iklim lambat," tutur Rudd.

Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan karbondioksida di atmosfer.

Pengelola industri yang mengurangi emisi karbon bisa menjual kredit karbon berdasarkan akumulasi karbon yang telah dikuranginya.

Tadinya, Australia akan memulai skema perdagangan karbon pada pertengahan 2010 meski para pelaku bisnis menuntut penundaan. Australia menargetkan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5-15 persen pada 2020. Skema perdagangan karbon Australia akan menjadi skema yang paling luas di luar Benua Eropa.

Skema tersebut akan memberikan izin bagi pemerintah untuk menawarkan pembatasan karbon terhadap industri. Harga emisi pada awal 2010 sekitar 23 dollar Australia per ton emisi karbon.

Presiden Direktur EcoSecu rities, Bruce Usher, memperkirakan hingga 2012 permintaan perdagangan karbon secara global akan mencapai 3,36 miliar ton.

Dari sisi penawaran, berdasarkan proyek, hanya terdaftar 2 miliar ton dengan total nilai kredit karbon sekitar 250 juta dollar AS.

Penundaan itu akan menyebabkan pemerintah Australia menerapkan kebijakan perubahan iklim lama yang memungkinkan pemerintah mengutip pajak lebih tinggi pada perusahaan untuk pengurangan emisi.

"Industri akan frustrasi. Ini akan berdampak buruk pada perusahaan," kata pengamat ekonomi dari Australian National University (ANU), Warwick McKibbin.

Penuhi Komitmen Rudd, yang akan maju pada pemilu tahun ini, menegaskan bahwa Australia harus tetap memenuhi komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pasalnya, wilayah Australia yang kering sangat menderita akibat munculnya perubahan iklim.

"Perubahan iklim secara moralitas masih menjadi tantangan bagi fundamental ekonomi dan lingkungan bagi semua warga Australia dan warga dunia," tegasnya.

Rudd menyatakan masih percaya bahwa skela perdagangan karbon merupakan cara yang paling efektif dan lebih murah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, dia terpaksa menunggu hingga berakhirnya komitmen Protokol Kyoto hingga akhir 2012.
mad/AFP/Rtr/E-3